

KONTRBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

Rahmad Kurniadi, Elfreda Aplonia Lau, Titin Ruliana

Fakultas Ekonomi, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia.

Email : rahmadkurniadi98@gmail.com

ABSTRAKSI

Pungutan Pajak Daerah yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah Kutai Timur belum dapat mencapai hasil yang optimal, karena kurang intensifikasinya petugas pungutan pajak, padahal pungutan pajak daerah cukup menjanjikan penerimaan yang lebih besar jika digali secara optimal, karena belum semua subjek pajak terpungut secara efektif mengingat ada wilayah subjek pajak yang sulit dijangkau, terutama yang berada diluar daerah Ibukota Kabupaten.

Maka untuk mencapai target yang diharapkan maka harus ditambah petugas administratif dan pengawas yang lebih handal atau yang kompeten sesuai kebutuhan dan memperpendek jalur birokrasi dan meningkatkan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah kepada wajib pajak, baik melalui penyuluhan, penyebaran pamflet, media cetak, radio maupun televisi. Juga perlunya menambah sarana operasional untuk memperlancar pungutan pajak daerah sesuai kebutuhan operasional, terutama untuk menjangkau ke daerah yang jauh dari ibukota Kabupaten.

Kata Kunci : Kontribusi, Pajak daerah

I. PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang mempunyai peranan penting guna menunjang kelancaran roda Pemerintah di daerah. Keterlibatan sumber-sumber pembiayaan akan menyebabkan kemampuan daerah menjadi rendah terutama dalam menyelenggarakan pelayanan masyarakat dan keterbatasan itu pula menyebabkan penyelenggaraan Pemerintah tidak efektif.

Sumber pendapatan bagi suatu daerah adalah urat nadi pembangunan bagi daerah tersebut, karena dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah harus dibiayai dari sumber-sumber penerimaan daerah yang terdiri dari 4 (empat) komponen utama, yaitu 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2. Dana Perimbangan, 3. Pinjaman Daerah dan ke 4. pendapatan lain-lain yang sah. Sebagaimana yang dikemukakan menurut Utomo, (2005 : 83) bahwa : “Untuk kelancaran penyelenggaraan

tugas-tugas dan fungsi pemerintahan, makm daerah harus mempunyai keuangan sendiri yang kuat. Ini berarti semakin besar kemampuan daerah memiliki sumber-sumber pembiayaan, maka ada kecendrungan umum dapat berjalan lebih efektif dan efisien”.

II. DASAR TEORI

Menurut Martono dan Agus (2010:4) Manajemen Keuangan adalah “Segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, mengelola aset sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh”.

Tujuan Manajemen Keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan demikian apabila suatu saat perusahaan dijual, maka harganya dapat ditetapkan setinggi mungkin. Seorang manajer juga harus mampu menekan arus peredaran uang agar terhindar dari tindakan yang tidak diinginkan.

Manajemen Keuangan daerah merupakan bagian dari Manajemen Pemerintahan Daerah selain Manajemen Kepegawaian dan manajemen teknis dari tiap-tiap instansi yang berhubungan dengan pelayanan public, atau kita sebut dengan Manajemen Pelayanan Publik dan Manajemen Administrasi Pembangunan Daerah.

Fungsi manajemen terbagi atas tiga tahapan utama yaitu : adanya proses perencanaan, adanya tahapan pelaksanaan, dan adanya tahapan pengendalian/ pengawasan.

III. METODE PENELITIAN

Jangkauan Penelitian

Penelitian dilakukan sesuai dengan objek tujuan penelitian dan lokasi utama yang dijadikan tempat penelitian adalah Depot Air Minum Isi Ulang SamaQua. Dimana terdapat data hasil penjualan yang dibukukan dalam setiap bulannya.

Rincian Data Yang Diperlukan

Untuk mempermudah penelitian dalam penulisan skripsi ini, maka data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

1. Gambaran Umum
2. Struktur Organisasi
3. Deskripsi
4. Jangkauan Masalah dilapangan
5. Data Laporan Realisasi Pajak Daerah Periode Tahun 2010 – 2014 Kabupaten Kutai Timur
6. Data Pendukung Lainnya yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknis pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian lapangan (*field work research*)
Metode pengumpulan data secara langsung yang didasarkan atas keadaan sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini penelitian lapangan dapat di lakukan dengan cara wawancara.
2. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Pada penelitian ini dilakukan pengumpulan data dari lapangan dengan cara membagikan kuisioner, tabulasi data yang selanjutnya dianalisa dan data – data yang berkaitan dengan penelitian ini.

Alat Analisis dan Uji Hipotesis

Metode analisis data yang digunakan untuk pengujian ini adalah alat kontribusi. Alat kontribusi adalah suatu alat yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kutai Timur, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, terhadap Pendapatan Asli Daerah. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi sebagai berikut :

Dimana :

$$\text{Kontribusi} = \frac{P}{N} \times 100\%$$

P = Realisasi Pajak

N = Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Dari pengertian kontribusi pajak daerah tersebut disimpulkan bahwa alat kontribusi bertujuan untuk mengukur rasio atau tingkat keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin berkontribusi dengan baik, standar minimal rasio keberhasilan adalah 100%. Tingkat Kontribusi dapat digolongkan kedalam beberapa kategori yaitu sebagai berikut:

Tabel . 3.1 Kategori Predikat Tingkat Kontribusi Pajak Daerah

No	Interval	Kategori
1.	81 – 100 %	Sangat Baik
2.	61 – 80 %	Baik
3.	41 – 60 %	Cukup Baik
4.	21 – 40 %	Kurang Baik
5.	0 – 20 %	Tidak Baik

(Sumber: Mahmudi, 2010)

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah akan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang telah dianggarkan

sebelumnya. Dengan menggunakan data Laporan realisasi penerimaan PAD semester I tahun 2014, maka perhitungan analisis efektivitas target dan realisasi penerimaan PAD yaitu sampai dengan semester 1 tahun 2014 dengan predikat efektif yaitu sebesar 50%. Besarnya efektivitas Pendapatan Asli Daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Halim, 2010):

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Dari pengertian efektivitas tersebut disimpulkan bahwa efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin efektif, standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif. Selama ini belum ada ukuran baku mengenai kategori efektivitas, ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja (*judgement*). Tingkat efektivitas dapat digolongkan kedalam beberapa kategori yaitu sebagai berikut:

Tabel. Kategori Predikat Rasio Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kategori Penilaian	Predikat
Sangat Efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90%-99%
Kurang Efektif	75%-89%
Tidak Efektif	<75%

(Sumber: Mahmudi, 2010)

IV. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil data sekunder dan primer yang didapat dari penelitian yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur, maka hasil dari penelitian ini sebagai berikut :

Tabel. Data Rekapitulasi Efektivitas Penerimaan PAD Kab.Kutim

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Persentase
2010	55.835.391.413,26	74.796.252.824,46	13,3 %
2011	65.278.544.253,75	53.198.415.526,32	0,81 %
2012	71.512.357.923,45	58.285.715.021,28	0,81 %
2013	85.936.351.590,41	80.033.603.261,83	0,93 %
2014	110.439.254.724,68	97.865.548.513,78	0,88 %

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kab.Kutim 2015

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis data yang digunakan untuk pengujian ini adalah alat kontribusi. Alat kontribusi adalah suatu alat yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kutai Timur, maka dibandingkanlah antara realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah umum yang digunakan untuk menghitung kontribusi sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{P}{N} \times 100\%$$

Dimana :

P = Realisasi Pajak

N= Realisasi PAD untuk satu tahun anggaran

1. Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap PAD Tahun 2010 – 2014

$$\text{a. Kontribusi 2010} = \frac{261,869,993,00}{74,796,252,824,46} \times 100\% = 0,76\%$$

$$\text{b. Kontribusi 2011} = \frac{409,560,063,00}{53,198,415,526,32} \times 100\% = 0,76\%$$

$$\text{c. Kontribusi 2012} = \frac{421,249,051,00}{58,285,715,021,28} \times 100\% = 0,72\%$$

58,285,715,021,28

- d. $\text{Kontribusi 2013} = \frac{267.154.319,00}{80.033.603.261,83} \times 100\% = 0,33\%$
 - e. $\text{Kontribusi 2014} = \frac{483.388.597,00}{97.865.548.513,78} \times 100\% = 0,49\%$
2. Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap PAD Tahun 2010 – 2014
- a. $\text{Kontribusi 2010} = \frac{368.224.829,00}{74.796.252.824,46} \times 100\% = 0,49\%$
 - b. $\text{Kontribusi 2011} = \frac{4.369.299.769,00}{53.198.415.526,32} \times 100\% = 8,21\%$
 - c. $\text{Kontribusi 2012} = \frac{10.785.290.080,00}{58.285.715.021,28} \times 100\% = 18,5\%$
 - d. $\text{Kontribusi 2013} = \frac{13.046.092.813,00}{80.033.603.261,83} \times 100\% = 16,3\%$
 - e. $\text{Kontribusi 2014} = \frac{16.153.042.390,00}{97.865.548.513,78} \times 100\% = 16,5\%$
3. Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap PAD Tahun 2010 – 2014
- a. $\text{Kontribusi 2010} = \frac{107.114.550,00}{74.796.252.824,46} \times 100\% = 0,14\%$
 - b. $\text{Kontribusi 2011} = \frac{113.117.650,00}{53.198.415.526,32} \times 100\% = 0,21\%$
 - c. $\text{Kontribusi 2012} = \frac{44.526.100,00}{58.285.715.021,28} \times 100\% = 0,07\%$
 - d. $\text{Kontribusi 2013} = \frac{91.379.265,00}{80.033.603.261,83} \times 100\% = 0,11\%$
 - e. $\text{Kontribusi 2014} = \frac{213.401.150,00}{97.865.548.513,78} \times 100\% = 0,21\%$

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pungutan pajak Daerah yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah nomor 01 Tahun 2011 tentang pajak daerah yang dapat dijadikan landasan untuk melakukan pungutan pajak daerah di Kabupaten Kutai Timur. secara implementatif belum dapat mencapai hasil yang optimal. Karena dalam pelaksanaannya dihadapkan pada suatu persoalan yang kompleks. bukan hanya menyangkut efektif dan efisiensi pelayanan tetapi juga menyangkut terbatasnya kuantitas dan kualitas..

Kurang optimalnya hasil pungutan pajak daerah di Kabupaten Kutai Timur hal tersebut terindikasi oleh realisasi

penerimaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir kurang mencapai target yang direncanakan. Walaupun pajak Daerah mengalami peningkatan tetapi belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana yang dikemukakan pada bab sebelum, maka penulis akan menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pungutan pajak daerah yang dilakukan Petugas Dinas Pendapatan Kabupaten Kutai Timur belum dapat mencapai hasil yang optimal. Terutama pajak daerah masih rendah atau kurang

- mencapai target yang rencanakan tetapi dilihat dan besarnya penerimaan masih tergolong kecil.
2. Penerimaan pajak daerah secara representatif belum menunjukkan kenaikan yang signifikan, maka kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah sangat kecil. Hal tersebut terindikasi oleh realisasi pajak Daerah walaupun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan tetapi nilai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah sangat kecil.
 3. Kurang optimalnya dalam realisasi penerimaan pajak daerah oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Kutai Timur disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya faktor alokasi dana operasional yang terbatas, kurang didukung dengan sarana/fasilitas operasional yang memadai, intensifikasi dan ekstensifikasi petugas untuk memanfaatkan peluang yang lebih besar untuk meningkatkan penerimaan, letak geografis dan kondisi subjek pajak yang terisolir dan rendahnya kesadaran wajib pajak
 3. Meningkatkan pengawasan secara langsung ke subjek dan objek Pajak dengan melakukan kerjasama yang baik dengan organisasi vertikal maupun aparat terkait.
 4. Menumbuhkan kesadaran pegawai untuk merubah pola pikir dan budaya kerja aparatur berorientasi pada kepentingan publik, melalui pembinaan, baik yang sifatnya untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian maupun terhadap pemanfaatan jam kerja secara efektif.
 5. Menambah petugas administratif dan pengawas yang lebih handal atau yang kompeten melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur sesuai kebutuhan dan memperpendek jalur birokrasi.
 6. Meningkatkan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, baik melalui penyuluhan, penyebaran pamflet, media cetak, radio maupun televisi.

Saran-Saran

Dari beberapa kesimpulan di atas, penulis akan mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan alokasi dana operasional untuk menunjang kelancaran pemungutan pajak Daerah dengan cara mengajukan penambahan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai kebutuhan.
2. Merenovasi dan menambah sarana / fasilitas operasional untuk memperlancar pungutan pajak daerah sesuai kebutuhan operasional, terutama untuk menjangkau ke daerah yang jauh dan ibukota kabupaten. Melalui rencana anggaran Pendapatan dan belanja daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo., 2002. Perpajakan Edisi Revisi 2002. Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
- Mahmudi., 2009. Manajemen Keuangan Daerah, Erlangga, Jakarta.
- Republik Indonesia., 2000. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- _____, 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.